



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Jumlah Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2019 – 2020

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja N-1 (2019)	Capaian Kinerja Tahun N (2020)	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	85.07	85.41	0.34 %
2	Angka Kemiskinan	7.22	6.90	-0.32 %
3	Angka Pengangguran	6.92	9.54	2.62 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.18	-3.29	0.89 %
5	Pendapatan Perkapita	67.38	66.18	-1.2 juta rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.289	0.303	0.014

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020, BPS Kota Banda Aceh



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

a. Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan jumlah APBK sebesar Rp.10.574.716.983,- dan APBN sebesar Rp.63.648.830.975,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.621.568.766,- atau 95%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program sebagai berikut: Pendidikan Anak Usian Dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Pendidikan Non Formal.

b. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan BLUD RSU Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan jumlah APBK sebesar Rp.386.006.780,- dan APBN sebesar Rp.4.033.539.572,- dan terealisasi sebesar Rp.1.760529.404,- atau 39,8%.

Anggaran tersebut adalah untuk membiayai program sebagai berikut: Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Penyakit tidak menular, Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

c. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan alokasi APBK sebesar Rp. 37.280.783.808,- dan terealisasi sebesar Rp.32.894.191.300,- atau 88,2%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020, secara umum dialokasikan untuk program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.



d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020, untuk program pelayanan dasar memiliki anggaran Rp.0,-. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya bencana alam dan rumah yang terkena relokasi program pemerintah.

e. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan APBK sebesar Rp.5.149.224.890,- dan terealisasi sebesar Rp.4.437.514.192,- atau 86%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program sebagai berikut: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

f. Ketenteraman dan Ketertiban

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBK Tahun 2020 sebesar Rp.13.798.889.178,- dan terealisasi sebesar Rp.11.913.872.064,- atau 86,3%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program sebagai berikut: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak criminal,



Pembinaan dan pengembangan syariat islam, Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk tahun 2020, prestasi capaian kinerja tidak dapat dilakukan perangkingan dikarenakan hasil evaluasi secara gabungan untuk masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi Aceh belum disampaikan oleh Tim Evaluasi Kinerja dan peningkatan kapasitas Daerah Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri Seksi Wilayah I.

Hasil EPPD tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 Kota Banda Aceh pada tataran pengambil kebijakan tidak ada IKK yang tidak DIIsi (tdi) dan pada pelaksana kebijakan ada 1 IKK yang tdi. Capaian kinerja urusan pemerintahan Kota Banda Aceh masih terdapat nilai dengan prestasi rendah (R).



b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 (lima) Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPK Kota Banda Aceh



4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN ANGGARAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh telah menetapkan besarnya pendapatan daerah untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.303.472.173.205,00 dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.258.958.789.879,62 atau 96,59%. Komposisi sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Banda Aceh terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp.714.874.122.000,00 atau 54.84% dari total pendapatan daerah. Disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 334.516.866.296,00 atau 25,66% dari total pendapatan daerah dan yang terkecil adalah pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp. 254.081.184.909,00 atau 19,49 % dari total pendapatan daerah.

5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN, REALISASI PENGELOUARAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Alokasi belanja tidak langsung pemerintah Kota Banda Aceh adalah Rp. 584.747.343.919,00 atau 42,64% dari total belanja pemerintah daerah, sedangkan belanja langsung adalah sebesar Rp. 786.425.851.625,00 atau 57,35% dari total belanja pemerintah daerah. Ini berarti bahwa APBD pemerintah Kota Banda Aceh lebih banyak digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

Secara umum, membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah.



Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka akan semakin baik, karena APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat.

Penerimaan pembiayaan daerah pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 terbesar berasal dari penerimaan pinjaman derah dan obligasi daerah yaitu sebesar 82.92 % dari penerimaan pembiayaan daerah dan sisanya 17.08% berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah terbesar pemerintah Kota Banda Aceh digunakan untuk pembayaran pokok utang yaitu sebesar 60,16% dari pengeluaran pembiayaan daerah dan sisanya untuk penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) yaitu sebesar 39.83% dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya pada pemerintah Kota Banda Aceh adalah penyerapan belanja daerah yang kurang optimal. Nilai sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam rangka menutup defisit daerah.



6. Inovasi Daerah

1) SINAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SINAKER) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum memiliki Sistem Informasi Ketenagakerjaan, dan untuk itu pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh melaksanakan pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SINAKER) yang terdiri dari proses produk hukum bidang Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Industri.

Tujuan dari inovasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SINAKER) ini adalah:

- a. untuk membuat proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi terakhir, serta dapat menjadi instrumen pendukung upaya pengambilan keputusan oleh pimpinan.
- b. sebagai instrumen pendukung upaya pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- c. untuk mempermudah dan mempersingkat SOP layanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dengan inovasi merancang dan mengembangkan aplikasi SINAKER;
- d. untuk mendukung gerakan Smart City Kota Banda Aceh untuk menjadi Kota yang lebih maju



2) Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13.

Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana berpedoman pada: **Hukum-hukum Dinul Islam, Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas perbankan nasional.**

